LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA

BIDANG PENDIDIKAN

KETERPURUKAN DUNIA PENDIDIKAN BERDAMPAK PADA PENURUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA

Disusun Oleh :

Fitroh Sapto Nugroho (E14204048)

Desti Hertanti (E14204056)

Maryo R. Manik (E14204068)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	KETERPURUKAN DUNIA PENDIDIKAN BERDAMPAK PADA PENURUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
Penulis	:	1. Fitroh Sapto Nugroho (E14204048) 2. Desti Hertanti (E14204056) 3. Maryo R. Manik (E14204068)
Tanggal pengeasahan	:	18 April 2007

Menyetujui :

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Dosen Pembimbing,
Prof. Dr. Yusuf Sudo Hadi	Ir. Andi Sukendro, MSi
NIP. 130 687 459	NIP.131.671.607

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa aras Rahmat dan karunianya, kelompok kami dapat menyelesaikan karya tulis ini yang merupakan karya tulis yang menuliskan aspirasi dan inspirasi masing-masing anggota kelompok dalam menghadapi realita pendidikan saat ini

Karya tulis ini berjudul " KETERPURUKAN DUNIA PENDIDIKAN BERDAMPAK PADA PENURUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA". Dalam karya tulis ini kami mencoba untuk memberikan salah satu alternative pengembangan penyaluran informasi serta engadaan sarana dan prasaana khususnya pada masyarakat pedesaan dalam bidang pertanian.

"Tak ada gading yang tak retak" mungkin hanya itu yang dapat kami tuliskan karena kami sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan didalam karya tulis ini, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu kami memperbaiki kesalahan pada karya tulis ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Bogor, April 2007

DAFTAR BAGAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM

RINGKASAN

Kualitas sumberdaya manusia suatu negara akan selalu terkait dengan pendidikan dan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pendidikan. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, sehingga output sumberdaya manusianya pun berbeda-beda. Indonesia tergolong negara yang memiliki sumberdaya manusia yang rendah, hal ini dibuktikan survei yang dilakukan oleh PERC yang berbasis di Hongkong bahwa Indonesia menempati urutan ke-12 atau yang terburuk didaerah Asia.

Biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal, tentunya hal ini akan memberatkan masyarakat yang tingkat ekonominya kurang atau kelas masyrakat menengah kebawah. Hal ini di karenakan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan. Dan untuk masyarakat menengah kebawah yang memiliki cita-cita untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi terpaksa harus mengurangi biaya kebutuhan hidupnya, seperti biaya makan dan tak jarang banyak orang tua yang bekerja banting tulang demi mendapatkan biaya untuk bisa menyekolahkan anaknya.

Penyebab lain yang mempengaruhi kurangnya sumber daya manusia di negara ini ialah kurangnya peran serta pemerintah terhadap masyarakat terpencil. Dapat dilihat bahwa pendidikan di daerah terpencil sangat kurang sekali. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu kurangnya tenaga pengajar. Kekurangan tenaga pengajar disebabkan oleh banyak pengajar yang tidak bersedia di tempatkan di tempat terpencil. Mereka cenderung memilih bekerja di kota daripada di desa.

Selain kurangnya tenaga pengajar ada hal lain yang menyebabkan pendidikan di daerah terpencil kurang, yaitu kurangnya pendistribusian alat dan buku-buku yang menyebabkan proses belajar mengajar terhambat. Ditambah lagi dengan kendala bahasa yang digunakan, karena tak jarang penyampaian materi pembelajaran disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah, hal ini akan menghambat pada saat diadakan ujian tingkat akhir nasional dimana bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Akibat dari faktor-faktor tersebut maka sumber daya manusia (SDM) di Indonesia rendah. Generasi muda yang seharusnya mendapat pendidikan yang lebih tinggi agar dapat membangun bangsa dan negara justru tidak diperhatikan sehingga sumber daya manusianya pun kurang berkualitas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi bangsa maju, pendidikan merupakan hal yang penting. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan. Bahkan, ada bangsa atau yang terkecil adalah keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi kualitas perumahan, pakaian, bahkan makanan, demi melaksanakan pendidikan anak-anaknya.

Seharusnya negara juga demikian. Apabila suatu negara ingin cepat maju dan berhasil dalam pembangunan, prioritas pembangunan negara itu adalah pendidikan. Jika perlu, sektor-sektor yang tidak penting ditunda dulu dan dana dipusatkan pada pembangunan pendidikan.

Negeri ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wàjib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Kualitas sumberdaya manusia dan daya saing bangsa indonesia yang rendah
2. Rendahnya faktor-faktor pendukung terselenggaranya pendidikan yang layak

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah

1. Mengkaji tentang kondisi dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, baik dari segi pengajar, siswa/siswi dan tentunya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan suatu wilayah.
2. Merumuskan solusi kreatif berkaitan dengan masalah pendidikan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan (Edukation) berasal dari kata edu-care (bahasa latin) yang mengandung arti membebaskan atau melepaskan. Kebebasan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas. Semakin besar kapabilita seseorang, akan semakin besar pula kebebasan yang dimilikinya untuk merespon peluang-peluang yang ada. Pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia menjadi wahana utama dalam meningkatkan kapabilitas seorang atau masyarakat. Bila tingkat pendidikan seseorang atau suatu masyarakat rendah, kapabilitasnya juga rendah. Tanpa kapabilitas, orang akan terus menjadi korban yang dikorbankan (*victizing victims*). (DEPDIKNAS, 2003)

Konsep pendidikan banyak mengalami perubahan dan setiap perubahan membawa pengaruh terhadap cara dan sistem belajar mengajar terutama pendidikan sekolah. Sistem belajar berorientasi kepada guru (*Teacher- centered orientation*) dan sekarang beralih kepada siswa (*Pupil- centered orientation*) atau dikenal dengan cara belajar siswa aktif (CBSA). (Utomo, 1993)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini, terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional merupakan alat yang sangat fungsional dalam upaya pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia serta dalam rangka pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh; yang menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Penjelasan Umum UU No. 2/1989). (Wahjoetomo, 1993)

Jika kita amati dengan cermmat maka masalah-masalah yang ditemukan di lapangan dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu yang berasal dari dalam pembelajaran itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari luar pembelajaran atau subjek yang belajar. (Suhaenah, 2000)

Adanya kecenderungan menurunnya motivasi belajar di kalangan peserta didik. Disinyalir di kalangan peserta didik telah berkembang "budaya baru" yang tidak kondusif lagi bagi peningkatan prestasi belajar, budaya pintas, budaya santai, cenderung senang berhura-hura, dan sejenisnya. (Santoso,1990)

III. METODE PENULISAN

3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data pada karya tulis yang berjudul "KETERPURUKAN DUNIA PENDIDIKAN BERDAMPAK PADA PENURUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA" diperoleh melalui internet berupa opini, surat kabar ataupun hasil diskusi mengenai pendidikan. Selain itu data-data ini diperoleh melalui berbagai macam literatur di perpustakan.

3.2.Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh, diolah kemudian kami sesuaikan dengan judul yang telah ada.

3.3. Analisis-Sintesis

Analisis dan sintesis data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dan mendiskusikannya.

3.4. Perumusan Solusi

Perumusan solusi diambil dari pembahasan masalah berdasarkan ide kreatif kelompok.

3.5. Pengambilan Keputusan dan Saran

Dalam pengambilan kesimpulan dan saran terhadap Karya Tulis Mahasiswa ini, kami mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan data-data yang telah didapat, diolah, dan dianalisis, serta berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kualitas sumberdaya manusia suatu negara akan selalu terkait dengan pendidikan dan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pendidikan. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, sehingga output sumberdaya manusianya pun berbeda-beda. Indonesia tergolong negara yang memiliki sumberdaya manusia yang rendah, hal ini dibuktikan survei yang dilakukan oleh PERC yang berbasis di Hongkong bahwa Indonesia menempati urutan ke-12 atau yang terburuk didaerah Asia.

Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan yang dipandang cukup baik dan bagus, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kesalahan yang mengakibatkan sistem pendidikan menjadi terpuruk.

Bagan 1 Sistem Pendidikan Menurut UU No 2 tahun 1989

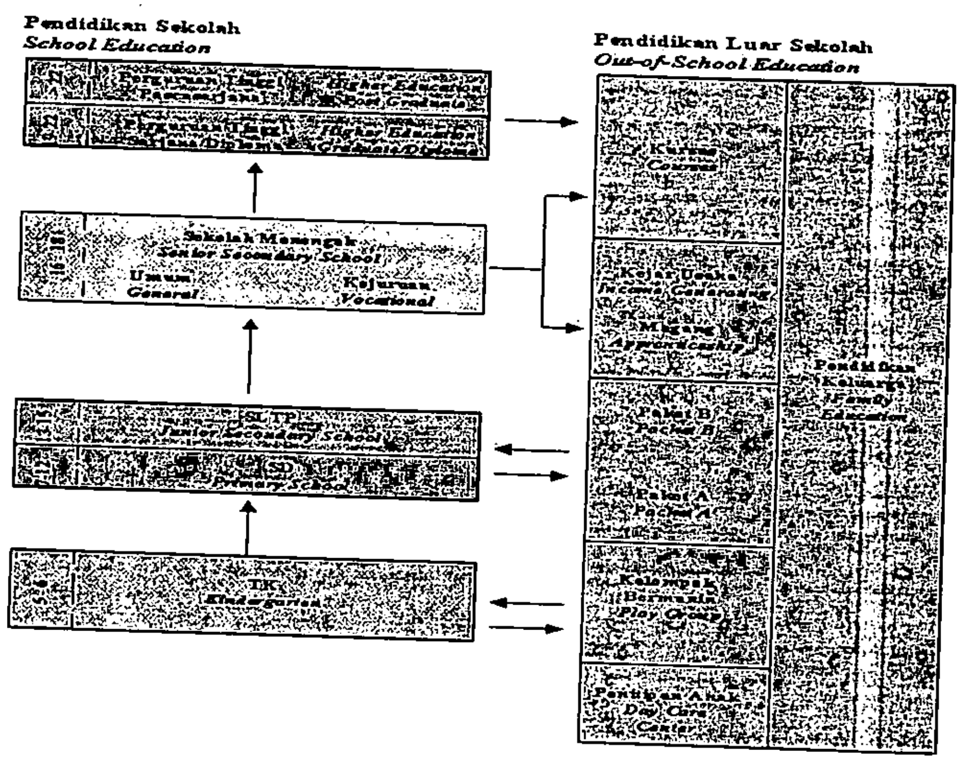

Sumber : Depdikbud

Bagan diatas menunjukkan gambaran sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia secara umum, bahwa pendidikan terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non-formal (luar sekolah). Namun secara sederhana sistem pendidikan yang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dapat digambarkan dengan pola hubungan seperti pada gambar 2

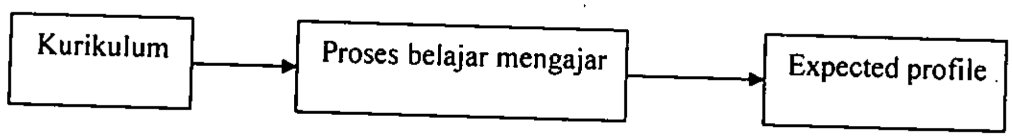

Bagan 2 Sistem Pendidikan sederhana

Kurikilum merupakan bahan-bahan yang akan diberikan sekolah dan merupakan landasan proses belajar mengajar, karena proses belajar mengajar disekolah-sekolah harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Pada dasarnya pemerintah telah membuat kurikulum yang bagus namun kurikulum yang dibuat tidak sesuai dengan expected profile (lulusan yang diharapkan). Mata ajaran yang tidak diperlukan terkadang tetap dimasukkan kedalam kurikulum yang ada, atau penyelesaian yang selalu dilakukan pemerintah adalah dengan mengganti kurikulum setiap tahunnya. Sebenarnya dengan mengganti kurikulum yang ada bukan membantu memperbaiki sistem pendidikan yang ada.

Proses belajar mengajar merupakan proses yang sangat penting dalam bidang pendidikan, karena hasil yang baik akan diperoleh melalui proses yang baik pula. Namun pada kenyataannya proses belajar yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses belajar mengajar yang diterapkan disekolah-sekolah cenderung membuat siswa bosan, jenuh ataupun kesal sehingga siswa sendiri tidak memiliki kemauan untuk belajar dengan baik dan tidak memacu siswa untuk berprestasi.

Expected profile merupakan lulusan yang diharapkan setelah mendapatkan proses pembelajaran dari kurikulum yang telah ada. Expected profile sendiri diharapkan dapat memenuhi lowongan/tenaga kerja yang dibutuhkan, dimana lulusan yang memiliki skill, keterampilan, kreatifitas dan sikap displin tinggi serta keuletan sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi.

Seharusnya dari ketiga komponen diatas baik kurikulum, proses belajar mengajar, dan expected profile harus dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan evaluasi ini agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak terulang lagi selain itu agar kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan menjadi gambaran atau tolak ukur untuk mengambil langkah selanjutnya.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya para generasi muda banyak disebabkan oleh faktor-faktor, baik yang sifatnya internal (dalam) dan faktor eksternal (luar).

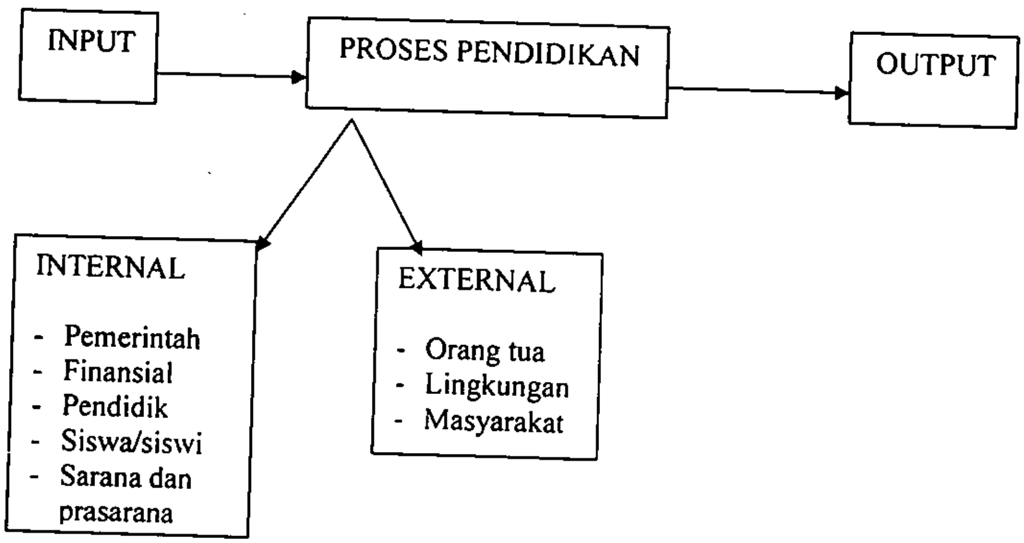

Bagan 3 Sistematika Proses Pendidikan

4.1. Biaya Pendidikan di Indonesia Tinggi

Banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan mulai dari biaya pendaftaran sekolah, biaya keperluan seragam dan biaya pembelian buku-buku yang setiap tahunnya ganti.

Pergulatan yang dihadapi orangtua untuk menyediakan uang ekstra setiap awal tahun ajaran karena mahalnya biaya pendidikan menimbulkan persepsi dan penilaian dari masyarakat itu sendiri, logikanya untuk masuk sekolah negeri dapat dipastikan biaya yang dikeluarkan tentunya tidak mahal artinya pendidikan sudah murah, namun dari realita yang dihadapi masyarakat pendidikan tetap saja mahal.

Ketiadaan biaya membuat anak-anak tidak bisa memperoleh salah satu hak dasarnya, yaitu pendidikan.

> Anti hampir saja tidak bisa mengenyam pendidikan, pasalnya untuk masuk Sekolah Dasar (SD) orangtuanya harus menyediakan uang pendaftaran sebesar Rp 500.000. Padahal, orangtua Anti hanya bekerja sebagai pekerja serabutan dan tentunya uang sebesar itu sungguh sangat memberatkannya. Selain harus membayar uang pendaftaran, orangtua Anti pun diharuskan membayar uang untuk keperluan seragam mulai dari seragam batik, seragam olah raga dan seragam pramuka. Biaya keperluan seragam sendiri tidak murah, terkadang uang yang harus dikeluarkan berjumlah ratusan ribu. Pembelian buku-buku paket juga terkadang memberatkan para orangtua, karena buku yang digunakan selalu berbeda tiap semesternya.

Mengacu pada kasus yang dihadapi Anti, maka muncul pertanyaan "Bagaimana mungkin masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti buruh mencuci, pembantu rumah tangga, buruh kasar, bisa menyekolahkan anaknya?" padahal, pada pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan Ayat (2) menyatakan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Namun pada kenyataanya berbeda, banyak anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak merasakan bangku sekolah karena mahalnya biaya pendidikan.

Masalah pendidikan ini sebenarnya terkait dengan pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Anak-anak yang yang tidak bisa mengenyam pendidikan cenderung berasal dari keluarga yang tidak mampu, karena penghasilan orangtuanya terbatas dan tidak cukup untuk membiayai keperluan anaknya untuk sekolah. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan pengetahuan, karena akibat mahalnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi, mereka terpaksa masuk sekolah yang juga minim fasilitas dan bermutu rendah sehingga hasil studi mereka pun tidak bisa berkembang dengan pesat, mereka memiliki pendidikan yang tidak bermutu dan pada akhirnya akan mengarahkan mereka pada pekerjaan rendahan. Hal tersebut menyebabkan

Nama Lengkap	: Maryo Rikhardo Manik
NRP	: E14204068
Tempat, Tanggal Lahir	: Sangkal, 19 Oktober 1985
Alamat	: Jalan Bara III No.70 Pondok Dame
No. Telepon/Hp	: (0251) 624690
Riwayat Pendidikan	: SDN SANGKAL
	SLTP sw BUDI MULIA PANGURURAN
	SMU 3 PEMATANG SIANTAR
	BUDIDAYA HUTAN FAHUTAN IPB
Prestasi	: -

terjadinya siklus lingkaran kemiskinan terus menerus yang hanya terjadi pada masyarakat kelas bawah. Mahalnya biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat disebabkan ketidakseimbangan antara penghasilan rata-rata rakyat Indonesia.

4.2. Kurangnya Peran Serta Pemerintah

4.2.1. Belum Terealisasinya Kebijakan Anggaran Pendidikan 20%

Terpuruknya mutu SDM Indonesia di posisi 112 dari 175 negara tak lepas dari sangat minimnya dan yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu rendahnya anggaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan, ialah kurangnya peran serta pemerintah dalam bidang pendidikan. Anggaran pemerintah Indonesia yang dialokasikan untuk pendidikan terendah di Asia Tenggara. Dari APBN anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20%, namun dalam pelaksanaannya anggaran pendidikan yang disediakan tidak mencapai 20 %. Dana APBN untuk tahun 2006 sebesar Rp 420 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan baru 9% atau sekitar Rp 85 triliun secara keseluruhan, seperti gaji guru dan dosen sampai pendidikan kedinasan, sebenarnya yang dimaksudkan 20% untuk anggaran pendidikan adalah diluar gaji guru dan dosen serta pendidikan kedinasan. Sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan umum dan dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional belum memenuhi amanat UUD dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebesar 20% dari APBN.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan anggaran pendidikan di Indonesia rendah. Akar masalah pendidikan di Indonesia rendah dapat diakibatkan pada model mental dan kepekaan. Pemerintah atau pembuat kebijakan pembangunan di sebuah negara yang mengabaikan pendidikan, dalam model mental pembangunannya tidak menaruh kulaitas manusia dan masyarakat sebagai pusat kemajuan. Sebaliknya, perbaikan kualitas manusia hanya menjadi salah satu program pembangunan, yang prioritasnya tidak lebih penting dari program lain. Model mental pembangunan dengan berporos pada kualitas manusia adalah model pembangunan yang bertumpu pada modal maya, namun bukan berarti modal fisik (Sumber Daya Alam) tidak diperlukan hanya kebijakan atau cara pemakaian dana yang diperoleh dari sumber daya alam akan berbeda bila model mental pembangunan yang dipegang berbeda. Penjelasan diatas dapat dijadikan sebuah alasan mengapa pemerintah cenderung lebih suka mensubsidi BBM dibanding pendidikan.

Sebenarnya pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pihak penyelenggara pendidik, untuk itu sesuai dengan surat keputusan Nomor : 044/U/2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Tujuan dari pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah untuk mengkoordinasikan ketrelibatan masyarakat sekitar sekolah, dalam membantu, mengawasi dan membina pelaksanaan pendidikan karena anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sampai sekarang belum terealisasikan sepenuhnya Gambaran Perkembangan Anggaran Rutin dan Pembangunan yang telah dikeluarkan Pemerintah mulai tahun 1991 hingga 1997

Tabel 1 Perkembangan Anggaran Rutin dan Pembangunan Pendidikan Tahun 1991/1992-1996/1997

Tahun Anggaran	Rutin		Pembangunan		Jumlah
	Sub-jumlah	%	Sub-jumlah	%	
1991/1992	1.649.709.308	63,19	961.054.100	36,81	2.610.763.408
% kenaikan	15,67		20,95		17,61
1992/1993	1.908.235.200	62,15	1.162.364.200	37,85	3.070.599.400
% kenaikan	20,25		15,68		18,52
1993/1994	2.294.724.000	63,05	1.344.570.600	36,95	3.639.294.600
% kenaikan	35,65		16,09		28,42
1994/1995	3.112.751.000	66,60	1.560.921.000	33,40	4.673.672.000
% kenaikan	16,79		15,71		16,43
1995/1996	3.635.289.708	66,81	1.806.175.000	33,19	5.441.464.708

% kenaikan	15,99		18,22			16,73
1996/1997	4.216.703.879	66,39	2.135.171.000	33,61		6.351.874.879

Sumber : Biro Keuangan, Depdikbud

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah mengalami kenaikan dari segi anggaran rutin dan anggaran pembangunan, namun dari segi jumlah keseluruhan persentase kenaikan hanya mengalami kenaikan sedikit hingga tahun 1997. Namun mulai tahun 1999, anggaran pendidikan merosot turun, hal ini bisa saja disebabkan karena pada tahun 1999 negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga anggaran pendidikan terabaikan, dan anggaran tersebut dialokasikan ke bidang lain.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik yang menyangkut budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum.Namun dengan anggaran dana yang rendah untuk pendidikan akan menjadi sebuah kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pendidikan, karena dengan minimnya anggaran maka kebutuhan tenaga pendidik dan untuk mengangkat PNS baru tidak dapat terpenuhi.

Untuk menyambut Era pasar bebas seharusnya pemerintah Indonesia memberikan anggaran lebih atau minimal 20 % dari APBN, sesuai rencana sebelumnya. Dengan demikian, fasilitas penunjang pendidikan, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium dan sebagainya bertambah banyak sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Perbaikan kualitas manusia dan masyarakat memerlukan dana yang sangat banyak dan dalam periode waktu yang lama. Namun pemerintah sebenarnya bukan tidak memiliki dana untuk perbaikan itu, hanya penggunaan dana yang ada sangat mengabaikan pendidikan.

4.2.2. Kurangnya Evaluasi Proses Pendidikan

Pemerintah berperan serta dalam pendidikan bukan hanya dari segi pemberian anggaran pendidikan namun pemerintah juga berperan dalam mengawasi jalannya proses belajar mengajar. Pemerintah sendiri merupakan salah satu pihak yang terkait secara langsung dengan penentuan kualitas mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat disebabkan oleh tidaknya adanya evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan itu sendiri, maka diharapkan pemerintah dapat berperan serta untuk mengawasi dan memberikan evaluasi mengenai pendidikan yang telah berjalan. Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan pemerintah bukan hanya factor siswa/siswi, evaluasi dilakukan pada semua factor pendukung jalannya pendidikan, seperti pendidik, proses belajar mengajar dan sarana serta prasarananya. Evaluasi yang ada pada saat ini cenderung menitik beratkan pada objek pendidikan yaitu siswa/siwi dengan diadakannya Ujian Nasional (UAN), pemerintah pun telah menetapkan batasan/border bagi siswa/siswi yang dapat lulus dengan menentukan nilai minimal yang harus diperoleh masing-masing siswa/siswi pada mata ajaran tertentu.

Pemerintah dapat melakukan evaluasi bukan hanya kepada siswa/siswi, namun evaluasi tersebut dapat dilakukan kepada tenaga pendidik (guru, dosen). Hal ini dapat diwujudkan misalnya saja dengan pelatihan guru-guru atau penataran guru-guru menurut kawasannya dalam periode waktu tertentu secara rutin. Diharapkan setelah memperoleh pelatihan dan penataran maka pendidik pun memiliki kualitas mengajar yang meningkat.

4.3. Mutu Kualitas Pendidik

Mutu Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan mutu tenaga kependidikan, khususnya tenaga pengajar. Menurut hasil penelitian LPTK se-Indonesia dalam Musyawarah Nasional LPTK di Bandung (1994) menunjukkan bahwa selama hampir dua daswarsa terakhir, yang memilih masuk IKIP/LPTK bukannya kelompok *top ten* melainkan *bottom ten* dari lulusan SMU, dengan perbedaan skor yang sangat signifikan antara pelamar. Hal ini mengartikan bahwa pendidikan anak bangsa diserahkan kepada para pendidik yang mutunya tidak terlalu dapat dibanggakan. Kesenjangan yang terjadi, disebabkan oleh kurangnya penghargaan atau keseriusan pemerintah untuk menghargai profesi seorang pendidik, sehingga orang-orang yang berada pada kelompok *top ten* tidak berminat untuk menjadi seorang pendidik/guru. Seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih tegas, misalnya saja membuat kebijakan untuk meningkatkan pamor dan status sosial para guru/pendidik. Jaminan kesejahteraan guru dan jaminan-jaminan sosial lain harus ditingkatkan, agar angkatan muda *top ten* juga berminat untuk menjadi pengajar/pendidik.

Adapun komposisi sumber daya manusia yang menjadi tenaga pendidik berdasarkan parameter pendidikan, disajikan dengan diagram sebagai berikut :

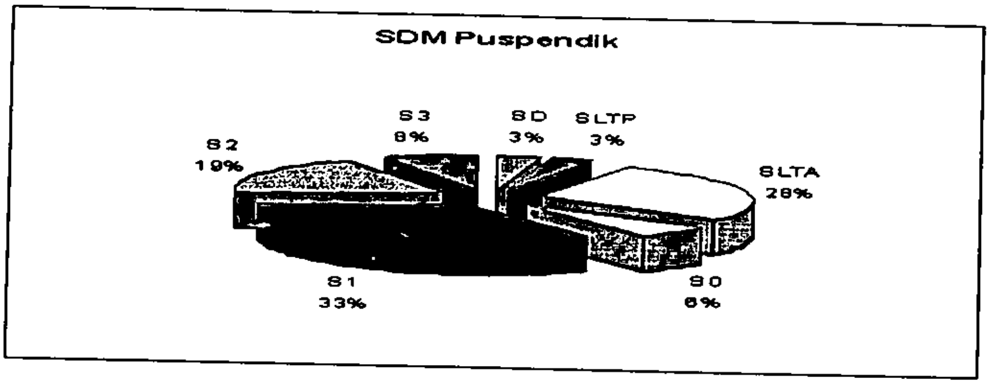

Diagram 1 Komposisi SDM tenaga pendidik

Mutu kualitas pendidik tidak mutlak ditentukan oleh nilai IQ yang dimiliki pendidik, melainkan di pengaruhi oleh nilai-nilai seperti EQ (kecerdasan emosional) serta SQ (kecerdasan spiritual) dan AQ (kecerdasan menghadapi masalah). Pendidik yang dikatakan berhasil mendidik siswanya dapat diartikan pendidik yang mampu membentuk kepribadian siswanya selain mendidik dari segi mengajarkan materi-materi dalam kurikulum yang ada. Kemampuan secara emosional diharapkan dapat dimiliki oleh tenaga pendidik, selain itu pendidik diharapkan memiliki kreatifitas yang tinggi.

Kreatifitas yang tinggi dari seorang pendidik dapat memberikan proses belajar mengajar yang kondusif, misalnya sekali waktu kegiatan belajar-mengajar dilakukan diluar kelas, sehingga siswa/siswi tidak merasa jenuh dan bosan jika harus selalu belajar diluar kelas. Contoh lain, pendidik dapat memanfaatkan alam sekitar sebagai objek pembelajaran yang efektif, selain tidak memerlukan biaya yang mahal hal ini pun terlihat lebih mudah dan sederhana. Dengan kreatifitas yang tinggi, pendidik pun diharapkan dapat memberikan terobosan baru dari segi metode belajar mengajar yang akan menimbulkan perasaan senang dan menyukai dari diri masing-masing siswa/siswi tersebut sehingga muncul persepsi baru yaitu belajar merupakan kesukaan dan kebiasaan bukan menjadi beban

4.4. Minat Belajar Anak Menurun

Banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan untuk bersekolah. Hal ini terjadi karena harga barang-barang kebutuhan hidup melonjak naik dan kesejahteraan masyarakat kurang sehingga anak-anak lebih memilih untuk mencari uang agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi dibandingkan harus bersekolah dan mengeluarkan uang lebih banyak. Tanpa mereka sadari bekerja dan pendidikan memiliki manfaat yang sangat berbeda. Bekerja memberikan manfaat yang hanya dapat dirasakan saat itu, ruang lingkup kerja pun dibatasi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga dapat diartikan pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan yaitu sebagai modal untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan.

Selain itu menurunnya minat belajar anak dapat disebabkan cara belajar mengajar yang tidak menarik. Kesalahan fatal yang terjadi dengan pendidikan Indonesia ialah proses belajar mengajar yang tidak disukai oleh siswa-siswi di sekolah.

4.5. Kesenjangan Sekolah Serta Fasilitas dan Prasarana

Minimnya tanggung jawab dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan makin mengukuhkan segregasi siswa berdasarkan status sosial-ekonomi. Siswa-siswi dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah minimalis, dimana biaya operasional per anak tidak jauh melebihi unit cost yang sudah ditetapkan. Sementara itu, siswa-siswi dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Selanjutnya karena sekolah-sekolah ini mendapat iuaran pendidikan memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu dengan biaya sekolah yang mahal pasti akan memperlebar kesenjangan sosial atau bisa dikatakan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial akan terus terjadi apabila masih terjadi diskriminasi, karena kesempatan bersekolah (sekolah yang bermutu) tidak diberikan kepada semua anak. Hal ini sangat tidak sesuai dengan pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pada kenyataannya, siswa-siswi yang berasal dari kelas menengah atas cenderung lebih suka bersekolah di swasta dibandingkan sekolah negeri, karena sarana dan prasarana yang disediakan sekolah swasta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan sekolah negeri yang terbatas. Namun untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan lengkap siswa-siswi tersebut harus membayar mahal, namun dengan kelengakapan fasilitas yang ada akan sangat menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang nantinya mengarah pada pembentukan kualitas SDM yang baik. Sedangkan sekolah negeri cenderung memiliki fasilitas yang kurang lengkap, namun umumnya masyarakat Indonesia lebih banyak menyekolahkan anaknya disekolah negeri karena faktor biaya yang relatif murah dibandingkan sekolah swasta. Pada akhirnya mutu SDM yang dihasilkan pun tidak begitu bagus.

Tabel 2 Prasarana dan Fasilitas Belajar

No	Jenis Prasarana/fasilitas Belajar	SD/MI		SMP/MTs	
		Ada (%)	Tidak (%)	Ada (%)	Tidak (%)
1.	R. Perpustakan	24,52	75,48	83,33	16,67
2.	R. Lab. Biologi	-	-	58,33	41,67
3.	R. Lab. Fisika	-	-	66,67	33,33
4.	R. Ketempilan	8,62	91,38	60,40	39,60
5.	Ruang UKS/BP	35,11	64,89	75,02	24,98
6.	Ruang Administrasi	90,72	9,28	95,82	4,18
7.	Listrik	76,15	23,85	97,91	2,09
8.	Air Bersih	52,98	47,02	81,24	18,76

Sumber : Tim peneliti UNMER Malang, 1993

Dari data dan informasi yang berhasil kami dari Internet diketahui bahwa jumlah sekolah yang telah memiliki sarana (ruang) perpustakan, laboratorium (biologi dan fisika), ruang keterampilan, ruang UKS, ruang administrasi serta penyediaan listrik dan air bersih cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah yang tidak memiliki sarana tersebut. Namun sarana pada sekolah tingkat menengah cenderung telah terpenuhi (dapat dilihat pada □ampe diatas).

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Siswa Menurut Status Sekolah Tahun Ajaran 1992/1993 – 1996/1997

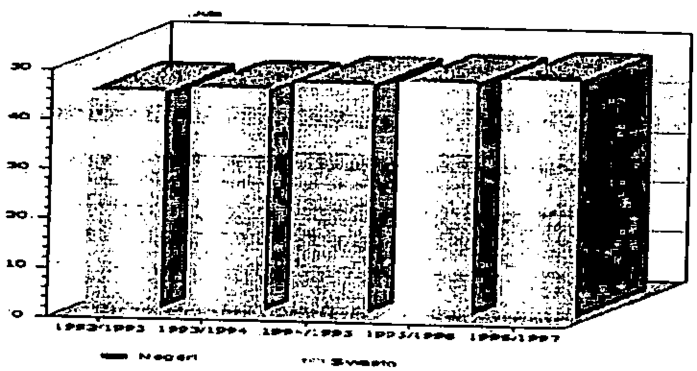

Sumber : Depdikbud

Dari grafik perkembangan jumlah siswa menurut status sosial mulai tahun 1992 hingga tahun 1997, menunjukkan peningkatan jumlah siswa-siswi yang bersekolah tiap tahunnya, namun ada perbedaan antara jumlah siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri dan sekolah swasta. Siswa-siswi pada sekolah negeri jumlahnya cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah siswa-siswi yang bersekolah disekolah swasta. Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan disekolah swasta yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah, padahal pada kenyataanya masyarakat Indonesia lebih didominasi oleh golongan masyarakat menengah kebawah.

Pada kenyataannya ada beberapa orang tua lebih memilih anaknya untuk sekolah di sekolah yang terfavorit. Walaupun biaya pendidikan yang ditawarkan cukup tinggi, karena menurut mereka yang kualitas pendidikan tetap yang utama. Untuk di daerah ibukota seperti DKI Jakarta biaya pendidikan untuk sekolah negeri □amper sama dengan sekolah swasta. Ada beberapa sekolah unggulan yang biaya pendidikannya lebih tinggi dari sekolah swasta.

4.6. Perumusan Solusi

Solusi kreatif yang ditawarkan oleh kelompok kami adalah :

1. Pemerintah melakukan penerapan system subsidi silang, dimana siswa dari keluarga berada membayar lebih besar dari pada siswa dari keluarga kurang beruntung.
2. Memberi wewenang kepada sekolah untuk menentukan buku standar yang akan dijadikan pegangan, baik bagi murid maupun guru dengan melibatkan komite sekolah serta memperhatikan jumlah siswa yang ada. Dengan memperhatikan jumlah siswa, buku itu dapat digunakan untuk siswa pada tahun berikutnya. Dengan pola seperti ini, dengan sendirinya pada tahun berikutnya sekolah tidak akan disibukkan dengan praktek jual beli buku pelajaran
3. Realisasi kebijakan pemerintah tentang anggaran pendidikan sebesar 20%, agar biaya pendidikan tidak terlalu mahal dan melengkapi sarana prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas pendidik dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill tenaga pendidik.
5. Menciptakan suasana belajar yang menarik minat siswa misalnya pada pelajaran pengetahuan alam, siswa di ajak pergi ke alam (hutan, pantai).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan materi ini maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor dominan dalam keseluruhan proses pembangunan bangsa dan negara. Hal itu, disebabkan karena pendidikan akan menentukan kualitas dan mutu sumberdaya manusia (SDM) suatu bangsa. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu: financial masyarakat, peran serta pemerintah, mutu tenaga pendidik, prasarana dan sarana pendukung, kurangnya keinginan belajar dari siswa itu sendiri. Penentuan kualitas pendidikan pun sangat terkait erat dengan proses belajar mengajar yang diterapkan. Proses pendidikan pun dipengaruhi oleh 2 faktor baik internal (terkait secara langsung dengan proses belajar mengajar) dan external (tidak terkait secara langsung dengan proses belajar mengajar), yaitu orang tua, lingkungan dan masyarakat.

5.2. Saran

Agar kualitas sumberdaya manusia serta kualitas pendidikan di Indonesia meningkat, maka sebaiknya

1. pemerintah lebih memperhatikan bidang pendidikan khususnya dalam hal penyediaan dana (anggaran) untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Undang-undang yang mengatur dana pendidikan sebesar 20% dari APBN sebaiknya segera direalisasikan
2. evaluasi secara rutin dan kontinyu baik dalam evaluasi kurikulum, proses belajar mengajar serta expected profile terkait.
3. pihak yang berkaitan secara langsung dengan proses pembelajaran dapat memperbaiki metode belajar mengajar menjadi lebih menarik sehingga siswa tersebut dapat menerima ilmu yang diberikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[DEPDIKNAS]. 2003. *Informasi Bantuan Pendidikan.* DEPDIKNAS. Jakarta.

Santoso S, Budi dkk. 1990. *Rumusan hasil Sminar Nasional Pemantapan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.* LEMHANAS dan Universitas Merdeka Malang. Malang.

Sasmito dkk. 1993. *Rumusan Hasil Seminar Nasional.* LEMHANAS dan Univesitas Merdeka Malang. Malang.

Suhaenah Suparno, A. 2000. *Membangun Kompetensi Belajar.* Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Utomo, Muhajirin dkk. 1993. *Prosiding Seminar Hasil Pembahasan Bidang Kependidikan.* Lembaga Penelitian Unila. Lampung.

Wahjoetomo. 1993. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.* Universitas Merdeka Malang dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

http://www.gatra.com/2004-07-2000

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/29/dikbud..html

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/27.html

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0410/30.htm

http://www.tempointeraktif.com/ng/nasional/2006/03/01.htm

http://www.waspada.co.id/serba_serbi/pendidikan/artikel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA

Nama Lengkap	: Desti Hertanti
NRP	: E14204055
Tempat, Tanggal Lahir	: 14 Desember 1986
Alamat	: Jalan Hegarmanah IV no 27 Rt 01/08 Pagentongan Gunung Batu Bogor 16617
No. Telepon/Hp	: (0251) / 081808728910
Riwayat Pendidikan	: TK PERTIWI II BENGKULU SDN PANARAGAN I BOGOR SLTPN 4 BOGOR SMUN 2 BOGOR BUDIDAYA HUTAN FAHUTAN IPB
Prestasi	: -

Nama Lengkap	: Fitroh Sapto Nugroho
NRP	: E14204048
Tempat, Tanggal Lahir	: 8 juli 1985
Alamat	: Asrama PPSDMS Reg 5 Bogor
No. Telepon/Hp	: (0251) 7160636/ 085280512046
Riwayat Pendidikan	: SDN WOTAN 2 SLTPN 1 PULUNG SMUN 2 PONOROGO BUDIDAYA HUTAN FAHUTAN IPB
Prestasi	: -